

## **BAB IV**

### **PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009**

Berdasarkan pada hasil analisa dan evaluasi serta capaian kinerja pembangunan pada 3 (tiga) tahun terakhir, partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan musrenbang tahunan daerah dan posisi tahun 2009 yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2007-2009 serta rencana kerja pemerintah pusat dan propinsi maka dapat diuraikan tema, strategi, arah kebijakan dan prinsip-prinsip pengarusutamaan pembangunan serta prioritas program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Probolinggo.

#### **4.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Tema Pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2009 mengacu pada tema pembangunan nasional tahun 2009 adalah Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengurangan Kemiskinan. Sedangkan Pengarusutamaan pembangunan terdiri dari: (1) Partisipasi Masyarakat; (2) Pembangunan Berkelanjutan; (3) Gender; (4) Tata Pengelolaan yang baik; (5) Pengurangan Kesenjangan Antar wilayah; dan (6) Desentralisasi dan Otonomi Daerah.

##### **1. Kebijakan Pembangunan Daerah**

Dengan mempertimbangkan kondisi faktual, tantangan dan permasalahan yang dihadapi serta kemampuan keuangan daerah dan potensi yang ada, maka kebijakan pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam tahun 2009 adalah sebagai berikut :

- b. Menyediakan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat miskin;
- c. Menyediakan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat miskin ;
- d. Meningkatkan Pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial guna mendukung tumbuhnya investasi ;
- e. Meningkatkan daya saing sektor pertanian dan kelautan, industri dan perdagangan, serta jasa keuangan dan jasa lainnya
- f. Meningkatkan pelaksanaan Otonomi daerah dan Pelayanan Publik berdasarkan prinsip Good Governance ;
- g. Menciptakan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

## 2. Strategi

Guna memperoleh hasil pembangunan yang optimal maka strategi pembangunan yang ditempuh adalah :

- a. Penanggulangan kemiskinan;
- b. Penciptaan kesempatan kerja dan berusaha untuk menangani permasalahan pengangguran;
- c. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan;
- d. Peningkatan investasi dan pemberdayaan ekonomi yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

### **4.2. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2009**

Berdasarkan pada sasaran yang akan dicapai dalam RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2007-2009, permasalahan dan tantangan pokok pembangunan tema, kebijakan dan strategi yang digunakan serta kemampuan keuangan daerah maka prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
2. Peningkatan ketahanan pangan melalui optimalisasi produksi pertanian, peternakan dan perikanan;
3. Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan;
4. Percepatan pembangunan infrastruktur dan perekonomian daerah;
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan otonomi daerah;
6. Pelestarian lingkungan hidup dan pencegahan bencana alam.

#### **1. Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran**

##### a. Kondisi Umum

Kemiskinan merupakan suatu persoalan struktural dan multidimensial yang kompleks mencakup sosial, politik, ekonomi dan budaya yang saling terkait. Secara umum "masyarakat miskin" adalah suatu kondisi masyarakat yang berada dalam situasi kerentanan, ketidak berdayaan, keterisolasian dan ketidak mampuan untuk menyampaikan aspirasinya. Kemiskinan tidak hanya ketidak mampuan ekonomi, tetapi juga

kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan didalam suatu kehidupan secara bermatabat.

Penduduk miskin Kabupaten Probolinggo masih relatif tinggi yaitu mencapai 412.349 jiwa atau 38,61% dari total penduduk sebanyak 1.068.000 jiwa pada tahun 2007.

Kemiskinan selalu berkorelasi positif dengan jumlah pengangguran, semakin tinggi jumlah masyarakat miskin maka semakin tinggi pula angka pengangguran di suatu wilayah.

Tabel 4.1  
Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Probolinggo

No	Uraian	Satuan	2005	2006	2007
1.	Angkatan Kerja	Orang	523.840	529.078	571.603
2.	Angkatan Kerja Tertampung	Orang	508.574	513.659	517.536
3.	Pencari Kerja	Orang	4.799	7.574	4.670
4.	Penduduk Usia Kerja	Orang	746.658	754.124	774.381
5.	Penduduk Bukan Usia Kerja	Orang	230.513	232.818	311.285

Sumber : Data Profil Kabupaten Probolinggo 2007

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Probolinggo masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, diantaranya:

1. Keterbatasan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin;
2. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap para penyandang cacat, fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya;
3. Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha serta kurangnya sarana dan prasarana pelatihan kerja;
4. Banyaknya tenaga kerja yang bekerja dilapangan usaha yang kurang produktif;
5. Lemahnya partisipasi masyarakat dalam perumusan pelaksanaan kebijakan/program di wilayahnya terutama wilayah perdesaan;
6. Belum optimalnya pelaksanaan pengarusutamaan gender.

b. Arah Kebijakan

Untuk mengatasi berbagai permasalahan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di wilayah Kabupaten Probolinggo, maka pembangunan diarahkan pada :

1. Pemenuhan hak atas layanan kesehatan bagi masyarakat miskin;
2. Pemenuhan hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijaksanaan dan program bagi masyarakat perdesaan;
3. Menciptakan kebijakan tentang kesetaraan dan kesempatan yang sama bagi perempuan diberbagai bidang pembangunan;
4. Menciptakan kebijakan tentang pemberdayaan ekonomi dan social terhadap para penyandang cacat, fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya;
5. Menciptakan dan memperluas kesempatan kerja dengan mengembangkan usaha mandiri, peningkatan pembinaan dan penempatan tenaga kerja, mendorong tersedianya informasi pasar kerja dan terbentuknya bursa kerja.
6. Meningkatkan kualitas dan produktivitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan keternagakerjaan.

c. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam penanggulangan kemiskinan dan pengangguran Kabupaten Probolinggo pada tahun 2008, adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya prosentase penduduk miskin;
2. Terpenuhinya pelayanan kesehatan bagi warga miskin;
3. Meningkatnya kualitas SDM penyandang cacat, fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya secara ekonomi dan sosial.
4. Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha guna mengurangi jumlah pengangguran dan setengah pengangguran;
5. Meningkatnya sarana dan prasarana pelatihan kerja;
6. Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja;
7. Meningkatnya partisipasi masyarakat perdesaan dalam pembangunan;
8. Menurunnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

d. Program

Untuk mewujudkan sasaran penanggulangan kemiskinan dan pengangguran sebagaimana tersebut di atas, ditempuh melalui program-program yang tercantum dalam Tabel 4.2 dibawah ini:

Tabel 4.2  
Matrik Prioritas Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Probolinggo  
Tahun 2009

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Nama Program	SKPD Pelaksana
2	3	4	5
Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Probolinggo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Program Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</li> <li>2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</li> <li>3 Program Pembinaan Anak Terlantar</li> <li>4 Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma</li> <li>5 Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo</li> <li>6 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</li> <li>7 Program Pengembangan Kawasan Miskin Perkotaan</li> <li>8 Program Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan</li> <li>9 Program Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Masyarakat Miskin</li> <li>10 Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</li> <li>11 Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan</li> <li>12 Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak</li> <li>13 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak</li> <li>14 Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja</li> <li>15 Program Peningkatan kesempatan kerja</li> <li>16 Program Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan</li> <li>17 Program Pengembangan wilayah transmigrasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Dinas Sosial</li> <li>2 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana</li> <li>3 Badan Pemberdayaan Masyarakat</li> <li>4 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</li> </ol>

## 2. Prioritas Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Dan Kesehatan

### a. Kondisi Umum

#### Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting didalam penyediaan tenaga ahli dan trampil yang tidak saja mempunyai kemampuan ilmu pengetahuan dan ketrampilan baku, namun mampu melakukan adaptasi dan mengembangkan sesuai dengan tuntutan dan kondisi lapangan kerja.

Perkembangan jumlah kelulusan, daya tampung dan angka putus sekolah di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2005 dan tahun 2007 sebagai berikut :

TABEL 4.3:  
Perkembangan Jumlah Lulusan, Daya Tampung  
dan Angka Putus Sekolah di Kabupaten Probolinggo

NO	URAIAN	2005	2006	2007
1.	Jumlah Lulusan SD (siswa)	19.319	16.457	16.231
2.	Lulusan SD diterima Kelas I SMTP (siswa)	6.503	13.216	13.115
3.	Jumlah Droup Out (DO) SD (siswa)	97	135	73
4.	Angka Transisi SD ke SMTP (%)	70,50	80,31	80,08
5.	Jumlah Lulusan SMTP (siswa)	4.626	8.443	4.980
6.	Lulusan SMTP diterima Kelas I SMTA (siswa)	2.415	6.569	2.205
7.	Jumlah Droup Out (DO) SMTP (siswa)	11	10	16
8.	Angka Transisi SMTP ke SMTA (%)	75,05	77,81	78,95

Sumber: Data Profil Kabupaten Probolinggo Tahun 2007

Dari data tersebut tampak bahwa pada tahun 2006 sebagian besar jumlah lulusan SD yaitu 16.457 siswa yang meneruskan ke SMP sebanyak 13.216 siswa atau hanya 80,3%. Sedangkan lulusan SMP sebanyak 8.443 siswa yang meneruskan ke SMA sebanyak 6.569 siswa atau 77,8%. Keberhasilan pendidikan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan seperti, sekolah, tenaga kependidikan/guru yang memadai.

**TABEL 4.4:**  
Perkembangan Jumlah Murid, Sekolah, Kelas dan Guru  
di Kabupaten Probolinggo

<b>NO</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
1.	Murid			
	- TK/RA	13.854	14.125	14.805
	- SD/MI	127.810	134.543	138.168
	- SMP/MTs	35.464	38.628	36.235
	- SMA/MA	15.471	16.475	17.585
2.	Sekolah			
	- TK/RA	623	645	635
	- SD/MI	1.090	1.049	1.063
	- SMP/MTs	314	348	332
	- SMA/MA	78	89	90
3.	Kelas			
	- TK/RA	1.133	1.171	1.125
	- SD/MI	6.058	5.986	6.394
	- SMP/MTs	1.140	1.205	1.125
	- SMA/MA	403	449	446
4.	Guru			
	- TK/RA	2.028	2.126	2.275
	- SD/MI	9.699	10.071	9.593
	- SMP/MTs	3.772	4.072	4.112
	- SMA/MA	2.043	2.033	2.003

Sumber: Data Profil Kabupaten Probolinggo Tahun 2007

Adapun permasalahan yang masih dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo yang terkait dengan bidang pendidikan, antara lain :

1. Partisipasi masyarakat mengikuti pendidikan cenderung menurun;
2. Rendahnya kualitas fasilitas pelayanan pendidikan khususnya SD/MI;
3. Kualitas pendidikan masih rendah dan belum memenuhi standart kompetensi;
4. Angka melek huruf masih relatif rendah;
5. Rendahnya cakupan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
6. Anggaran pendidikan masih belum mencukupi.

## Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Probolinggo secara umum relatif baik yang tercermin dari Indeks Harapan Hidup pada tahun 2007 mencapai 61,08 tahun. Keberhasilan pembangunan dibidang kesehatan yang telah dicapai dapat dilihat dari berbagai indikator derajat kesehatan, sebagai berikut :

TABEL 4.5  
Perkembangan indikator Derajat Kesehatan

No	Indikator	satuan	2005	2006	2007
1.	Angka Kematian Bayi (AKB)	Promil	5,02	8,18	9,5
2.	Angka Kematian Ibu (AKI)	Promil	0,85	0,41	61
3.	Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)	Prosen	1,53	1,70	21
4.	Cakupan Ibu Hamil (K1)	Prosen	97,10	97,40	96,5
5.	Cakupan Ibu Hamil (K4)	Prosen	84,40	85,10	88,5
6.	Cakupan Persalinan (Linakes)	Prosen	85,40	83,00	90,6

Sumber: Data Profil Kabupaten Probolinggo Tahun 2007

Adapun permasalahan bidang kesehatan yang masih dihadapi secara rinci adalah :

1. Perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat (PHBS);
2. Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan dan permukiman;
3. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
4. Rendahnya status kesehatan masyarakat;
5. Terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusinya yang tidak merata.

### b. Arah Kebijakan

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kebijakan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Probolinggo, diarahkan untuk :

1. Memperbaiki sarana dan prasarana sekolah khususnya kondisi ruang kelas dan sekolah;
2. Menurunkan secara signifikan jumlah penduduk yang buta aksara;
3. Meningkatkan perluasan dan pemeratan pendidikan menengah;
4. Meningkatkan perluasan pendidikan anak usia dini;
5. Menyelenggarakan pendidikan non formal yang bermutu;

6. Menyediakan materi dan peralatan pendidikan terkini;
7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kependidikan;
8. Menyempurnakan manajemen pendidikan;
9. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan;
10. Memperbaiki sarana dan prasarana serta kualitas Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu dan Polindes;
11. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan;
12. Meningkatkan sosialisasi/penyuluhan kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat;
13. Meningkatkan pendidikan kesehatan pada masyarakat;
14. Pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dasar;
15. Peningkatan kemampuan pelayanan rujukan di RSUD waluyojati Kraksaan;
16. Peningkatan perbaikan status gizi.

c. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai pembangunan bidang pendidikan adalah:

1. Meningkatnya secara nyata prosentase penduduk yang dapat menyelesaikan program Wajib Belajar 9 (Sembilan) tahun;
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan;
3. Meningkatnya kualitas dan mutu pendidikan;
4. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi manajemen pelayanan pendidikan (Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, meningkatnya anggaran pendidikan, meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pendidikan);
5. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan
6. Meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH);
7. Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB);
8. Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan;
9. Menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita;
10. Meningkatnya tenaga kesehatan dan distribusi yang merata.

d. Program

Untuk mewujudkan sasaran peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan sebagaimana tersebut di atas, ditempuh melalui program-program sebagai berikut :

Tabel 4.6  
Matrik Prioritas Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Probolinggo  
Tahun 2009

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Nama Program	SKPD Pelaksana
Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan;	Meningkatkan Kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	1 Program Pendidikan Anak Usia Dini	1 Dinas Pendidikan
		2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	2 Dinas Kesehatan
		3 Program Pendidikan Menengah	3 BPKM RSUD Waluyo Jati
		4 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4 RSUD Tongas
		5 Program Pendidikan Luar Sekolah	
		6 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	
		7 Program Obat dan perbekalan kesehatan	
		8 Program Upaya kesehatan masyarakat	
		9 Program Pengawasan obat dan makanan	
		10 Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	
		11 Program Perbaikan gizi masyarakat	
		12 Program Pengembangan Lingkungan sehat	
		13 Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	
		14 Program Pelayanan kesehatan penduduk miskin	
		15 Program Pengadaan dan peningkatan sarpras rumah sakit	
		16 Program Pengadaan dan peningkatan sarpras rumah sakit	
		17 Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita dan Usila	
		18 Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	

### 3. Peningkatan Ketahanan Pangan Melalui Optimalisasi Produksi Pertanian, Peternakan Dan Perikanan

#### a. Kondisi Umum

Peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Probolinggo dilakukan dengan mengoptimalkan produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan, guna mendukung perekonomian daerah dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat.

#### Pertanian Tanaman Pangan

Wilayah Kabupaten Probolinggo seluas 169.616 Ha dan peruntukan lahan di Kabupaten Probolinggo didominasi oleh hutan (32,89%), tegalan (31,13%), serta persawahan (22,70%). Sedangkan lahan permukiman yang merupakan kawasan terbangunnya hanya meliputi 7,60% dari seluruh luas lahan.

TABEL 4.7  
Luas panen dan produksi pertanian tanaman pangan  
Kabupaten Probolinggo Tahun 2007

No	Uraian	Luas panen (ha)	Produksi (ton)
1	Padi	52.421	249.233
2	Jagung	62.501	154.501
3	Ubi kayu	10.337	201.884
4	Ubi jalar	68	798
5	Kedelai	2.389	2.197
6	Kacang tanah	4.433	5.177
7	Kacang hijau	1.246	1.662
8	Bawang merah	6.233	70.452
9	Kobis	3.062	50.744
10	Kentang	2.860	35.592

Sumber data : Probolinggo Dalam Angka Tahun 2005-2006

#### Peternakan

Sub sektor peternakan yang tidak kalah penting peranannya dalam perekonomian Kabupaten Probolinggo adalah peternakan rakyat, apalagi dikaitkan dengan usaha peningkatan gizi dan penyediaan protein hewani bagi penduduk serta diversifikasi usaha dan peningkatan pendapatan petani. Jumlah tenaga kerja yang bekerja di bidang peternakan rakyat tahun 2005 sekitar 53.090 jiwa.

Produksi hasil ternak pada tahun 2006 yaitu daging 4.693.683 kg , telur 1.273.094 kg, susu 3.689.979 liter. Sedangkan konsumsi protein hewani di Kabupaten Probolinggo baru mencapai 4,28 gram/kapita/hari dan

masih jauh dari standart konsumsi hewani Nasional yang sudah mencapai 6 gram/kapita/hari.

Beberapa kendala utama yang dihadapi pada sektor pertanian baik produktivitas, efisiensi usaha, konversi lahan pertanian, keterbatasan sarana prasarana serta terbatasnya kredit maupun infrastruktur pertanian. Kendala dan permasalahan tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

1. Rendahnya kesejahteraan dan relatif tingginya kemiskinan petani.
2. Masih tingginya ketergantungan pada beras dan masih rentannya ketahanan pangan.
3. Masih rendahnya akses petani terhadap sumber daya produktif termasuk permodalan.

Perikanan

Kabupaten Probolinggo terletak dipesisir bagian utara kawasan Pantura Jatim, memiliki panjang pantai ± 75 km yang merupakan potensi kelautan dan perikanan besar, mencakup perikanan laut dan perikanan darat. Perikanan laut terbesar di 7 Kecamatan yaitu Tongas, Sumberasih, Dringu, Gending, Pajarakan, Kraksaan dan Paiton. Sepanjang pantai utara di Kabupaten Probolinggo terdapat permukiman nelayan yang menggantungkan pada laut sebagai mata pencahariannya. Jumlah nelayan yang ada di Kabupaten Probolinggo sebanyak 12.220 orang, sedangkan petani ikan sebanyak 1.325 orang. Jumlah armada perikanan tercatat 2.261 buah kapal tempel dan perahu sebanyak 226 buah.

TABEL 4.8  
Perkembangan produksi dan nilai produksi perikanan

No	Uraian	Tahun 2006	Tahun 2007
1	Perikanan laut		
	• Produksi (ton)	8.799.250	8.998.750
	• Nilai produksi (Rp)	32.090.000	32.540.000
2	Perikanan Darat		
	• Produksi (ton)	179.821	183.239
	• Nilai produksi (Rp)	1.325.653	1.559.750
3	Perairan umum		
	• Produksi (ton)	74.896	76.645
	• Nilai produksi (Rp)	372.623	399.590
4	Tambak		
	• Produksi (ton)	2.908.741	3.005.897
	• Nilai produksi (Rp)	35.397.708	35.578.250

Sumber data : Probolinggo Dalam Angka Tahun 2007

Beberapa permasalahan yang dihadapi disektor perikanan dan kelautan yang secara umum, adalah :

1. Belum optimalnya usaha perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
2. Terjadinya kerusakan ekosistem laut / pesisir yang menyebabkan rendahnya produktivitas;
3. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung usaha perikanan tangkap dan budidaya.

b. Arah Kebijakan

Untuk mengatasi permasalahan sektor perikanan yang meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan Perikanan di Kabupaten Probolinggo, maka kebijakan pembangunan diarahkan pada:

1. Peningkatan produktifitas, kualitas petani dan mutu hasil pertanian meliputi, penguatan kelembagaan, revitalisasi penyuluhan, peningkatan pengetahuan, ketrampilan petani, penerapan teknologi tepat guna, memperbaiki mutu komoditas pertanian, pengembangan usaha agribisnis dan penguatan sistem pemasaran dan manajemen.
2. Peningkatan akses petani terhadap sumber daya produktifitas dan permodalan meliputi: menata kepemilikan, penggunaan, pemanfaatan untuk akses lahan dan agunan memperoleh permodalan, mendukung ketersediaan sarana produksi dan pengolahan hasil pertanian serta meningkatkan layanan lembaga keuangan perdesaan.
3. Peningkatan kesejahteraan petani, kualitas hidup petani dan rumah tangga petani, yang diarahkan untuk mengamankan ketersediaan pangan dan melindungi petani dari persaingan dan perdagangan yang tidak adil dan tidak sehat.
4. Peningkatan produktivitas, kualitas petani ikan/nelayan serta mutu hasil kelautan dan perikanan. Meliputi: penguatan kelembagaan, revitalisasi penyuluhan dan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani ikan/nelayan dan menurunnya produksi hasil lautan dan perikanan.

5. Peningkatan akses petani ikan/nelayan terhadap sumberdaya produktivitas dan permodalan, meliputi :
  - Menata kepemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan, sertifikasi tanah / lahan untuk memperoleh modal.
  - Pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana produksi dan pengelolaan ikan.
  - Meningkatkan layanan lembaga keuangan perdesaan dan Usaha Kecil Mikro dan Koperasi.
6. Peningkatan kesejahteraan petani ikan/nelayan, kualitas terhadap petani ikan/nelayan dan rumah tangga petani ikan/nelayan, meliputi: peningkatan produktivitas perikanan budidaya dan perikanan tangkap serta dapat membantu peluang kerja baru.

c. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai pembangunan bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan pada tahun 2009 adalah :

1. Meningkatnya jumlah produktivitas pertanian terutama produksi beras, sehingga menjadikan Kabupaten Probolinggo sebagai penyangga pangan regional maupun nasional;
2. Meningkatnya diversifikasi produksi, ketersediaan dan konsumsi pangan untuk menurunkan ketergantungan pada beras sekaligus meningkatkan mutu gizi;
3. Meningkatnya akses petani terhadap permodalan;
4. Meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap protein hewani yang berasal dari ternak;
5. Meningkatnya pemanfaatan luas areal lahan tidak produktif;
6. Meningkatnya akses petani ikan / nelayan terhadap permodalan;
7. Meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap protein hewani yang berasal dari ikan;
8. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani ikan / nelayan.

d. Program

Untuk mewujudkan sasaran peningkatan ketahanan pangan sebagaimana tersebut di atas, ditempuh melalui program-program sebagai berikut :

Tabel 4.9.  
Matrik Prioritas Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Probolinggo  
Tahun 2009

<b>Prioritas Pembangunan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Nama Program</b>	<b>SKPD Pelaksana</b>
Peningkatan ketahanan pangan melalui optimalisasi produksi pertanian, peternakan dan perikanan;	Meningkatkan ketahanan pangan melalui optimalisasi produksi pertanian, peternakan dan perikanan;	1 Pengembangan Agribisnis	1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
		2 Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	2 Dinas Perkebunan dan Kehutanan
		3 Peningkatan produksi pertanian/perkebunan	3 Dinas Perikanan dan Kelautan
		4 Peningkatan kesejahteraan petani	4 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		5 Peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan	5 Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuulhan Pertanian
		6 Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	
		7 Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	
		8 Pengembangan budidaya perikanan	
		9 Pengembangan perikanan tangkap	
		10 Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	
		11 Pengembangan sistem penyuluhan perikanan	
		12 Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	
		13 Peningkatan produksi hasil ternak	
		14 Peningkatan penerapan teknologi ternak	
		15 Peningkatan pemasaran hasil produksi ternak	

#### **4. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dan Perekonomian Daerah**

##### a. Kondisi Umum

Pembangunan infrastruktur, pengembangan usaha dan penguatan perekonomian sektor riil menjadi indikator keberhasilan pembangunan daerah. Perdagangan, investasi dan industri baik besar, kecil maupun menengah merupakan tulang punggung sektor riil yang perlu terus dikembangkan. Sementara itu di sektor jasa dan keuangan peran koperasi dan perbankan sangat dibutuhkan untuk mendukung permodalan usaha dari pelaku ekonomi riil tersebut.

##### Transportasi

Sektor transportasi merupakan salah satu sektor yang mendukung perkembangan wilayah. Salah satu sarana transportasi yang penting adalah jalan. Ruas jalan yang ada di Kabupaten Probolinggo terbagi dalam 3 kategori yaitu : jalan negara panjangnya 38,21 km dalam kondisi baik, jalan Propinsi sepanjang 54 km. Sedangkan jalan Kabupaten sepanjang 785,819 km. Menurut kondisinya, jalan kabupaten terbagi dalam kondisi baik sepanjang 582.986 km, kondisi sedang sepanjang 79.716 km dan kondisi rusak sepanjang 19,252 km serta kondisi rusak parah sepanjang 103.865 km.

Adapun permasalahan sektor transportasi yang mencakup prasarana jalan dan perhubungan, diantaranya:

1. Kondisi prasarana jalan sebagian besar masih perlu penanganan / pemeliharaan;
2. Banyaknya prasarana jalan dan jembatan yang perlu ditingkatkan kualitasnya.;
3. Belum terpadunya pembangunan prasarana jalan dengan sistem jaringan transportasi jalan, penataan kelas jalan dan terminal serta pola pelayanan distribusi angkutan jalan;
4. Kondisi kualitas dan kuantitas sarana pelayanan angkutan umum masih terbatas.

### Perumahan dan Permukiman

Fungsi perumahan dan permukiman meliputi pelayanan pengembangan perumahan dan permukiman mencakup prasarana dasar dan prasarana penunjang yang dapat menunjang kualitas hidup meliputi : perumahan, air bersih dan air limbah, persampahan, Drainase, ruang terbuka hijau, pertamanan dan pemakaman serta penerangan jalan umum.

Adapun permasalahan sektor Pemerintah Kabupaten Probolinggo masih dihadapkan pada permasalahan sebagai berikut:

1. Terbatasnya kemampuan penyediaan prasarana dan sarana perumahan;
2. Menurunnya kondisi prasarana publik dan bangunan Pemerintah;
3. Pelayanan air bersih belum optimal, disebabkan rendahnya kualitas pengelolaan pelayanan air minum oleh PDAM, meningkatnya tingkat kebocoran dan tingkat pendapatan masyarakat rendah serta terbatasnya jaringan pipa;
4. Relatif masih tingginya penggunaan jamban terbuka;
5. Pengelolaan sampah belum dilaksanakan secara efektif dan efisien;
6. Mulai menurunnya kondisi prasarana drainase;
7. Menyempitnya lahan ruang hijau terbuka;
8. Penerangan jalan umum masih kurang.

### Pengairan

Air merupakan kebutuhan pokok manusia untuk melangsungkan kehidupan dan kesejahteraannya. Pembangunan sumber daya air pada dasarnya merupakan upaya untuk memberikan akses secara adil kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan air, agar mampu berperikehidupan yang sehat, bersih dan produktif. Sumber daya air yang ada di Kabupaten Probolinggo meliputi : Sungai yang berfungsi selain sebagai alat transportasi juga menjadi sumber pengairan teknik persawahan.

Permasalahan yang dihadapi pembangunan sektor sumber daya air antara lain :

1. Meningkatnya kebutuhan air bagi masyarakat;
2. Menurunnya kemampuan penyediaan air;
3. Lemahnya koordinasi, kelembagaan dan tata laksana.

#### Investasi Daerah

Dalam rangka menuju kemandirian daerah sebagai realisasi semangat dan kebijakan otonomi daerah antara lain kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah. Salah satu cara yang ditempuh dengan peningkatan investasi dan peningkatan kinerja BUMD. Keberhasilan bidang investasi /penanaman modal akan memberikan kontribusi pada kegiatan riil dan pertumbuhan ekonomi.

Upaya untuk mendorong peningkatan investasi dilakukan melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif dan promosi serta kerja sama investasi diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Upaya untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Probolinggo dihadapkan pada berbagai permasalahan, yaitu :

1. Belum optimalnya jaringan promosi sebagai sarana pengembangan investasi/penanaman modal;
2. Belum optimalnya pelayanan dan rendahnya kepastian hukum dalam investasi/penanaman modal;
3. Kurangnya insentif investasi dan keterbatasan infrastruktur serta rendahnya kualitas SDM.

#### Perindustrian, Perdagangan dan KUKM

Kemampuan daya saing ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa iklim kondusif lingkungan usaha dan perekonomian daerah dan mendukung pembangunan sektor-sektor industri, perdagangan, koperasi dan UMKM sektor tersebut sangat mempunyai peranan penting dan memajukan perekonomian regional dan sektor ini merupakan salah satu penggerak perekonomian rakyat di wilayah Kabupaten Probolinggo. Kondisi jumlah unit usaha, tenaga kerja, nilai investasi dan nilai produksi tahun 2005-2007 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TABEL 4.10:  
Perkembangan Unit Usaha Industri di Kabupaten Probolinggo

NO	URAIAN	2005	2006	2007
1.	Industri Mesin Logam dan Kimia (ILMK)			
	- Industri Kecil			
	a. Formal	41	41	41
	b. Non Formal	843	863	954
	- Industri Menengah	3	3	3
	- Industri Besar	-	-	-
2.	Industri Aneka (I-A)			
	- Industri Kecil			
	a. Formal	30	35	35
	b. Non Formal	1.543	1.661	1.730
	- Industri Menengah	-	-	-
	- Industri Besar	-	-	-
3.	Industri Hasil Pertanian & Kehutanan (IHPK)			
	- Industri Kecil			
	a. Formal	123	142	186
	b. Non Formal	2.310	2.480	2.756
	- Industri Menengah	10	10	10
	- Industri Besar	6	6	6
	<b>Jumlah</b>	4.909	5.223	5.721

Sumber Data Profil Tahun 2007

Melihat perkembangan unit usaha, yang selalu mengalami peningkatan, Pemerintah Daerah diharapkan dapat berperan besar dalam membangun basis industri yang kokoh dan menciptakan lingkungan usaha yang kondusif.

Namun dalam rangka meningkatkan daya saing industri, dan perdagangan di Kabupaten Probolinggo masih dihadapkan beberapa permasalahan, seperti:

1. Kualitas SDM yang relatif masih rendah yang tercermin kurangnya produktivitas tenaga kerja;
2. Masih rendahnya penerapan standarisasi untuk produk-produk industri manufaktur;
3. Lemahnya akses UMKM kepada sumber daya produktif, yaitu permodalan, teknologi, informasi dan pasar;

4. Masih banyaknya koperasi yang dinilai belum sehat, terlihat bahwa koperasi di Kabupaten Probolinggo memiliki kecenderungan adanya peningkatan anggota dan jumlah simpanan, tetapi omset volume usahanya mengalami penurunan;
5. Masih rendahnya produktivitas UMKM dan koperasi, karena kualitas Sumber Daya Manusia UMKM dan koperasi masih rendah, rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM dan terbatasnya sarana prasarana operasional dan modal usaha;
6. Minimnya sarana dan prasarana perdagangan yang memadai.

#### Pariwisata dan budaya

Jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2007 sebanyak 75.428 orang terdiri atas 3.244 wisatawan mancanegara dan 72.184 orang wisatawan Nusantara. Pada tahun 2007 kunjungan wisatawan ke obyek wisata di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan disbanding pada tahun-tahun sebelumnya, hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi masyarakat dan keamanan secara nasional yang mengalami penurunan oleh adanya isu terorisme. kunjungan wisatawan yang terus menerus ditingkatkan secara tidak langsung dapat mengangkat perekonomian masyarakat disekitarnya bila dikembangkan dan dikelola secara optimal.

Namun ada berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penciptaan obyek wisata religius unggulan, antara lain :

1. Belum optimalnya jaringan kerjasama lintas sektor dan lintas daerah tujuan wisata.
2. Sarana prasarana pariwisata yang belum memadai.

#### b. Arah Kebijakan

Kebijakan pembangunan transportasi di Kabupaten Probolinggo diarahkan pada :

1. Peningkatan kinerja pelayanan prasarana jalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangannya;
2. Peningkatan kualitas jalan dan jembatan untuk menunjang perkembangan sektor-sektor strategis dan pertumbuhan/pengembangan wilayah serta daerah terisolir dengan tetap memperhatikan lingkungan;

3. Kebijakan pembangunan prasarana dan sarana transportasi;
4. Meningkatkan kelancaran pelayanan angkutan jalan;
5. Meningkatkan keselamatan transportasi.

Kebijakan pembangunan perumahan dan pemukiman di Kabupaten Probolinggo diarahkan pada:

1. Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana perumahan & permukiman;
2. Meningkatkan kondisi fasum dan fasos serta prasarana publik lainnya dan bangunan Pemerintah;
3. Mengoptimalkan pelayanan air bersih dengan mengurangi tingkat kebocoran dan menambah jaringan pipa;
4. Meningkatkan pengelolaan persampahan;
5. Meningkatkan kondisi prasarana drainase;
6. Menata kawasan lahan terbuka hijau;
7. Meningkatkan kondisi penerangan jalan umum.

Kebijakan pembangunan sektor pengairan di Kabupaten Probolinggo diarahkan pada:

1. Konservasi sumber daya air dilakukan dengan pembangunan tampungan air;
2. Peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi;
3. Pemenuhan kebutuhan air baku diprioritaskan pada rumah tangga di wilayah rawan air dan desa tertinggal;
4. Pengendalian daya rusak air melalui konservasi sumber daya air;
5. Meningkatkan koordinasi antar instansi yang bertanggung jawab dalam pemanfaatan sumber daya air;
6. Penataan dan penguatan system pengolahan data dan informasi sumber daya air yang dikelola secara berkesinambungan;

kebijakan pembangunan industri, perdagangan dan KUKM di Kabupaten Probolinggo, diarahkan pada :

1. Menciptakan iklim kondusif bagi dunia industri dan perdagangan melalui penyederhanaan proses pinjaman, memfasilitasi ketersediaan akses permodalan, peningkatan mutu produksi dll;

2. Meningkatkan keselarasan hubungan antara tenaga kerja dengan pengusaha melalui pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Undang – Undang Ketenaga Kerjaan;
3. Mengembangkan lahan-lahan potensial dan infrastruktur jalan yang memberi dampak besar dibidang perekonomian;
4. Mengembangkan koperasi dan UMKM melalui pengembangan sentra-sentra industri kecil;
5. Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan melalui fasilitasi bagi investor untuk membangun pasar, grosir, swalayan di wilayah Kabupaten Probolinggo.

Kebijakan peningkatan investasi di Kabupaten Probolinggo, diarahkan pada :

1. Penuntasan deregulasi dan pemangkasan birokrasi, peraturan dan prosedur perijinan serta pengembangan kapasitas lembaga publik pelaksanaannya. Sehingga diharapkan dapat mengurangi biaya transaksi dan praktek ekonomi biaya tinggi;
2. Upaya peningkatan kualitas pelayanan investasi harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat dan pengusaha serta dilaksanakan secara cepat, tepat, murah, terbuka, sederhana, mudah dan tidak diskriminatif;
3. Memperbaiki kebijakan investasi dengan membuat cetak biru pengembangan kebijakan investasi yang menitik beratkan pada peningkatan partisipasi aktif pemerintah, pengusaha dan masyarakat, merumuskan sistem insentif dan kebijakan investasi, meningkatkan fasilitas penyediaan informasi dan promosi investasi serta menggalang kerjasama pengembangan investasi antar daerah;

Kebijakan pembangunan sektor pariwisata, diarahkan pada:

1. Meningkatkan pemasaran dan jaringan pariwisata melalui intensifikasi kerjasama dengan biro perjalanan wisata dan Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota di Jawa timur;

2. Meningkatkan mutu pelayanan dan diversifikasi produk wisata melalui penyediaan sarana prasarana wisata yang memiliki keunggulan strategis;
  3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia pariwisata melalui pelatihan yang relevan dan berkelanjutan. Selain itu juga memberikan bimbingan pada pedagang di sekitar objek wisata meningkatkan kualitas barang dan pelayanan kepada wisatawan yang datang;
- c. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana pada tahun 2009, adalah :

1. Terpeliharanya jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan sedang agar dapat berfungsi sesuai dengan tingkat pelayanan dan umur rencana;
2. Meningkatnya kapasitas maupun kualitas prasarana jalan dan jembatan sesuai dengan tuntutan pertumbuhan lalu lintas, status jalan, kondisi geografis, pengembangan wilayah dan tuntutan masyarakat;
3. Meningkatnya aksesibilitas wilayah yang sedang dan belum berkembang melalui sarana transportasi;
4. Meningkatnya keterjangkauan pelayanan transportasi umum bagi masyarakat perkotaan dan perdesaan serta dukungan transportasi perintis di daerah terpencil;
5. Meningkatnya kesadaran masyarakat berlalu lintas dan meningkatnya kualitas pelayanan transportasi terutama keselamatan;
6. Meningkatnya/terpeliharanya prasarana dan sarana dasar perumahan / permukiman;
7. Meningkatnya kondisi prasarana dan sarana pelayanan publik dan bangunan pemerintah;
8. Meningkatnya cakupan pelayanan air minum;
9. Teratasinya kelangkaan air bersih pada musim kemarau dan daerah rawan kekeringan;

10. Meningkatnya cakupan rumah tangga yang menggunakan jamban tertutup;
11. Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah;
12. Meningkatnya prasarana dan sarana drainase diperkotaan;
13. Terwujudnya lingkungan yang layak, sehat dan aman;
14. Meningkatnya kesehatan masyarakat;
15. Meningkatnya ruang terbuka hijau diwilayah perkotaan dan perdesaan;
16. Meningkatnya cakupan penerangan jalan umum yang tetap memperhatikan efisiensi penggunaan daya;
17. Tercapainya pola pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan;
18. Meningkatnya kemampuan pemenuhan kebutuhan air bagi rumah tangga, permukiman, pertanian dan industri;
19. Berkurangnya dampak bencana banjir dan kekeringan;
20. Terlindunginya daerah pantai dari abrasi air laut;
21. Meningkatnya kualitas koordinasi dan kerjasama antar instansi;

Sasaran yang ingin dicapai pembangunan perekonomian daerah pada tahun 2009, adalah :

1. Meningkatnya pertumbuhan sektor industri manufaktur dan perdagangan yang disertai terciptanya lapangan kerja produktif dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi industri dan usaha perdagangan yang sudah ada;
3. Meningkatnya penerapan standarisasi produk industri manufaktur;
4. Meningkatnya penyaluran permodalan Usaha kepada KUKM;
5. Meningkatnya kinerja Usaha, kualitas kelembagaan dan organisasi KUKM;
6. Meningkatnya sarana prasarana perdagangan yang dapat memacu omset perdagangan;

7. Meningkatkan realisasi investasi sesuai kebutuhan penanaman modal PMA/PMDN untuk pembangunan di Kabupaten Probolinggo;
8. meningkatkan jumlah wisatawan Nusantara dan tingkat hunian wisatawan Nusantara dan mancanegara;
9. Meningkatnya pemasaran daerah tujuan wisata yang kompetitif;
10. Meningkatnya mutu pelayanan dan diversifikasi produk wisata yang tercermin meningkatnya prasarana dasar obyek wisata;
11. Meningkatnya manajemen obyek wisata tercermin dari tertatanya tarif distribusi, lahan parkir, personalia dan administrasi obyek wisata;

d. Program

Untuk mewujudkan sasaran pembangunan infrastruktur dan perekonomian daerah sebagaimana tersebut diatas, ditempuh melalui program-program seperti dalam tabel berikut :

Tabel 4.11.  
Matrik Prioritas Pembangunan infrastruktur dan perekonomian daerah di Kabupaten Probolinggo Tahun 2009

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Nama Program	SKPD Pelaksana
Percepatan pembangunan infrastruktur dan perekonomian daerah;	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pembangunan infrastruktur	1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	1 Dinas PU Bina Marga
		2 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	2 Dinas PU Pengairan
		3 Program Peningkatan Sarpras kebinamargaan	3 Dinas PU Cipta Karya
		4 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	4 Dinas Perhubungan
		5 Program Rehabilitasi/PemeliharaanTurap/Talud/Brojong	5 Dinas Koperasi & UKM
		6 Program rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Sungai	6 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		7 Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	7 Dinas Kebudayaan & Pariwisata
		8 Program Normalisasi Saluran Pembuang Avour	
		9 Program Rehabilitasi Bangunan di Sungai	
		10 Program Penyediaan dan pengelolaan air baku	
		11 Program Penunjang PU Pengairan	
		12 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	
		13 Program Pembangunan infrastruktur pedesaan	
		14 Program Lingkungan sehat perumahan	
		15 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	
		16 Program Pengembangan Perumahan	
		17 Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum Dan Air Limbah	
		18 Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	
		19 Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	
		20 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas	

21	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	
22	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	
23	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	
24	Program Kemetrologian	
25	Program Peningkatan Perdagangan dalam negeri	
26	Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	
27	Program Pengembangan industri kecil dan menengah	
28	Program Peningkatan kemampuan SDM industri	
29	Program Pengembangan Kemitraan	
30	Program Peningkatan Standarisasi Produk Industri	
31	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	
32	Program Program Promosi Investasi	
33	Program Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	
34	Program Pengembangan pemasaran pariwisata	
35	Program Program Pengembangan Objek Wisata	
36	Program Program Kemitraan & Jasa Pariwisata	

## **5. Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah Dan Pelayanan Publik**

### **a. Kondisi Umum**

Pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten Probolinggo selalu diupayakan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. sehingga pelaksanaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa selalu dilaksanakan dalam kerangka peningkatan pelaksanaan otonomi daerah. Disamping itu peningkatan kualitas pelayanan publik juga terus ditingkatkan kinerjanya, hal ini merupakan indikator terpenting dari pelaksanaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sesuai dengan prinsip good governance dan kualitas pelayanan publik yang lebih baik di Kabupaten Probolinggo, masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain yaitu :

1. Belum tersedianya standar pelayanan minimal (SPM) pada instansi pemerintah;
2. Belum adanya kepastian mengenai Pedoman Struktur Kelembagaan pemerintah daerah;
3. Belum Optimalnya Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur;
4. Pengelolaan dan kemampuan keuangan daerah belum optimal;
5. Perencanaan pembangunan daerah belum optimal;
6. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik;
7. Pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah belum optimal.

### **b. Arah Kebijakan**

Dalam rangka menanggulangi permasalahan diatas kebijakan pembangunan diarahkan kepada :

1. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan ;
2. Mengupayakan adanya standar pelayanan minimal (SPM) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Menyusun Pedoman Struktur Organisasi Kelembagaan Pemerintah Daerah;
4. Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur;

5. Meningkatkan Perencanaan Penganggaran dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Meningkatkan kualitas pelayanan public di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah;

c. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang Pemerintahan, adalah:

1. meningkatnya penerapan Gerakan Disiplin Nasional (GDN) dan budaya kerja ;
2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintahan;
3. Tersusunnya hasil perencanaan dan evaluasi kinerja seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
4. Meningkatnya kemandirian dan kemampuan keuangan daerah tercermin meningkatnya jumlah Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) dan bagi hasil;
5. Terjaminnya konsistensi seluruh praturan perundang-undangan di Kabupaten Probolinggo dengan peraturan pusat, terpenuhinya kebutuhan peraturan hukum dan HAM sesuai dengan perkembangannya;
6. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

d. Program

Untuk mewujudkan sasaran pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Pelayanan Publik, sebagaimana tersebut diatas, ditempuh melalui program-program dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.12  
Matrik Prioritas Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Probolinggo Tahun 2009

Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pelaksanaan Otonomi Daerah;	Sasaran	Nama Program	SKPD Pelaksana
Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan otonomi daerah;	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan otonomi daerah;	1 Program Pelayanan Administrasi perkantoran	3 Badan, 12 Dinas, 13 Kantor, 9 Bagian dan Sekretariat Dewan
		2 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	
		3 Program Peningkatan disiplin aparatur	
		4 Program Fasilitas pindah / purna tugas PNS	
		5 Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	
		6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	
		7 Program Perencanaan tata ruang	
		8 Program Perencanaan pembangunan daerah	
		9 Program Perencanaan pembangunan ekonomi	
		10 Program Perencanaan pembangunan sosial dan budaya	
		11 Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	
		12 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan	
		13 Program Pengembangan data/informasi statistik daerah	
		14 Program Penataan administrasi kependudukan	
		15 Program Keluarga berencana	
		16 Program Kesehatan reproduksi remaja	
		17 Program Pelayanan kontrasepsi	
		18 Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	
		19 Program Pengembangan wawasan kebangsaan	
		20 Program Pendidikan politik masyarakat	
		21 Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	

22	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah	
23	Program Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	
24	Program Penataan Peraturan perundang-undangan	
25	Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	
26	Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	
27	Program Perbaikan sistem administrasi kerajinan	
28	Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	
29	Program Penataan Kelembagaan Pemerintah dan Ketatalaksanaan	
30	Program Pendidikan kedinasan	
31	Program Pembinaan dan pengembangan aparatur	
32	Program pemeliharaan trantibum serta penegakan perda	
33	Program peningkatan sarana dan prasarana trantibum	
34	Program Peningkatan peran serta kepemudaan	
35	Program Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga	
36	Program Peningkatan sarana dan prasarana olah raga	
37	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	
38	Program Pengembangan Nilai Budaya	
39	Program Pengelolaan Budaya Daerah	
40	Program pengelolaan keragaman budaya	

## **6. Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Pencegahan Bencana Alam**

### **a. Kondisi Umum**

Konstitusi mengamanatkan bahwa Sumber Daya Alam dimanfaatkan sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat dan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam ini tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Fungsi perlindungan lingkungan hidup meliputi pelayanan daerah terhadap manajemen limbah, air limbah, penanggulangan polusi, konservasi sumber daya alam, tata ruang dan pertanahan, penelitian dan pengembangan perlindungan lingkungan hidup serta perlindungan lingkungan hidup lainnya.

Lahan kritis dapat terjadi karena faktor alam dan manusia. Lahan kritis dapat berupa tanah tandus ataupun hutan yang gundul. Kondisi ini dapat mengakibatkan kurang produktifnya lahan dan pada tingkat yang lebih parah dapat menimbulkan bencana, baik longsor maupun banjir. Sebagian besar lahan kritis terjadi akibat adanya alih fungsi hutan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Kawasan pantai secara umum merupakan kawasan lindung yang harus dijaga kelestariannya. Kawasan yang harus dilindungi tersebut berupa hutan mangrove. Mangrove selain berfungsi sebagai penangkis ombak yang dapat merusak pantai juga berfungsi sebagai tempat hidup organisme laut. Apabila kegiatan pengrusakan ini tidak segera dikendalikan maka dikhawatirkan akan terjadi kerusakan lingkungan pantai yang lebih parah lagi.

Permasalahan yang dihadapi dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Pencegahan Bencana Alam, yaitu :

1. Adanya kecenderungan peningkatan pencemaran lingkungan Hidup;
2. Semakin rusaknya habitat ekosistem pesisir dan laut, panjang pantai yang terkena Abrasi mencapai 14 Km dan hutan Mangrove yang terkena Abrasi pantai seluas 795,30 ha menyebabkan garis pantai, pencemaran laut, penyakit ikan dan rusaknya mangrove yang akan mengancam potensi sumber daya perikanan;
3. Belum optimalnya pendayagunaan potensi kelautan ;

4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan ;
5. Adanya keterbatasan data dan informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan

b. Arah Kebijakan

Untuk mengatasi berbagai permasalahan Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Pencegahan Bencana Alam, maka kebijakan pembangunan diarahkan pada:

1. Peningkatan kelestarian hutan untuk keseimbangan tata air dan lingkungan hidup dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan ;
2. Peningkatan kegiatan penghijauan, Rehabilitasi lahan kritis dan Rehabilitasi hutan lindung ;
3. Penegakkan hukum dan peningkatan koordinasi antar daerah dalam rangka pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan .
4. Mengelola dan mendayagunakan potensi sumber daya laut, pesisir secara lestari berbasis masyarakat ;
5. Meningkatkan upaya konservasi laut, pesisir serta merehabilitasi ekosistem yang rusak (terumbu karang dan mangrove) ;
6. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup wilayah pesisir, laut dan perairan tawar ;
7. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir ;
8. Pengelolaan lingkungan alam dengan penekanan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan ;
9. Pengelolaan lingkungan buatan dengan penekanan pengendalian kegiatan yang berakibat kerusakan dan pecemaran lingkungan ;
10. Pengelolaan lingkungan buatan yang penekanan pada kapasitas kelembagaan, sumberdaya manusia, peran pengusaha dan peran masyarakat ;
11. Penegakkan hukum lingkungan agar masyarakat mematuhi peraturan lingkungan yang berlaku ;
12. Perbaiki manajemen dan system informasi Lingkungan Hidup.

c. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai pembangunan bidang Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Pencegahan Bencana Alam , adalah :

1. Terwujudnya pembentukan dan pengelolaan kawasan konservasi yang mantap dengan luas kawasan yang cukup bagi kawasan hutan lindung ;
2. Terwujudnya pengelolaan hutan yang efisien dan profesional yang melibatkan masyarakat sekitar hutan secara aktif;
3. Berkurangnya pelanggaran dan perusakan sumberdaya pesisir dan laut ;
4. Membaiknya pengelolaan ekosistem pesisir, laut secara lestari, terpadu dan Berbasis Masyarakat ;
5. Meningkatnya luas kawasan konservasi laut ;
6. Terwujudnya Ekosistem pesisir dan laut yang terjaga kebersihan, kesehatan dan produktifitasnya ;
7. Menurunnya dan terkendalinya tingkat pencemaran lingkungan Hidup ;
8. Terwujudnya pengelolaan limbah yang berwawasan lingkungan secara terpadu dan sistematis ;
9. Terlaksananya Rehabilitasi dan pelestarian fungsi ekosistem dan daya dukung lingkungan alam pada kawasan strategis ;
10. Meningkatnya kerjasama antar lembaga dan antar daerah serta dukungan masyarakat dalam upaya Rehabilitasi dan pelestarian lingkungan hidup.

d. Program

Untuk mewujudkan sasaran Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Pencegahan Bencana Alam sebagaimana tersebut, maka program yang akan dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.13  
Matrik Prioritas Pelestarian lingkungan hidup dan pencegahan bencana alam di Kabupaten Probolinggo  
Tahun 2009

Prioritas Pambangunan	Sasaran	Nama Program	SKPD Pelaksana
Pelestarian lingkungan hidup dan pencegahan bencana alam	Meningkatkan antisipasi bencana dan pelestarian lingkungan Hidup	1 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH	Badan Lingkungan Hidup
		2 Program Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH	Dinas Perkebunan dan Kehutanan
		3 Program perlindungan dan konservasi SDA	
		4 Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	
		5 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	
		6 Program Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan	